

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai pengaruh penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah, dan transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah dapat ditarik sebagai berikut:

1. variabel penyajian laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap variabel akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah diperoleh nilai signifikansinya maka H1 ditolak. Artinya tidak ada pengaruh penyajian laporan keuangan daerah terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah.
2. variabel aksesibilitas laporan keuangan daerah tidak berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah. Maka H2 ditolak. Hal ini bisa dikarenakan masih banyaknya hambatan untuk mendapat akses terhadap laporan keuangan daerah. Dan masih belum banyak tersedianya informasi mengenai laporan keuangan daerah tiap daerah melalui media masa, internet ataupun website.
3. variabel transparansi berpengaruh terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah maka H3 diterima artinya terdapat pengaruh transparansi terhadap akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah secara positif .

5.2 Implikasi Teoritis

1. Penyajian laporan keuangan daerah yang konfeshensif adalah salah satu alat untuk memvasilitasih terciptanya akuntabilits publik yang telah direncanakan oleh Superdi (2017). Pemerintah daerah harus mampu memberikan pertanggungjawaban laporan keuangan kepada masyarakat. Saat itu, akan tetapi upaya penyajian pelaporan keuangan daerah nampaknya belum dapat dilaksanakan sepenuhnya pemerintah daerah. Pelaporan pertanggungjawaban pemerintah terkait keberhasilan atau kegagalan pengelolaan keuangan atau kinerja kepada masyarakat baik langsung atau diwakili oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dapat diketahui melalui media seperti surat kabar majalah,radio, stasiun televisi dan website (intern) pemerintah. Aksesibilitas laporan keuangan merupakan kemudahan bagi seseorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan menurut penelitian Fauzyah (2017) pertanggungjawaban oleh Hehanusa (2015)
2. Merupakan kemudahan bagi seorang untuk memperoleh informasi mengenai laporan keuangan. Penggunaan informasi keuangan yang efektif tergantungjawab kepada akses publik terhadap laporan keuangan yang dapat dibaca dan dipahami oleh penelitian Sanjaya (2014) Transparansi dan akuntabilitas keuangan publik di Indonesia merupakan isu yang semakin mendapat perhatian dalam beberapa tahun terakhir ini.
3. Menurut Mardiasmo, transparansi berarti keterbukaan (*Openness*) pemerintah dalam memberikan informasi yang terkait dengan aktifitas

pengelolaan sumberdaya publik kepada pihak-pihak yang membutuhkan informasi. Transparasi dan akuntabilitas keuangan daerah adalah pertanggungjawaban pemerintah daerah berkenan dengan pengelolaan keuangan daerah kepada publik secara terbuka dan jujur melalui media berupa penyajian laporan keuangan yang dapat di akses oleh berbagai pihak yang berkepentingan dengan anggapan bahwa publik berhak mengetahui informasi tersebut.

4. Akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah merupakan proses pengelolaan keuangan daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban, serta pengawasan yang benar-benar dapat dilaporkan dan dipertanggungjawabkan kepada DPRD dan masyarakat terkait dengan kegagalan maupun keberhasilannya sebagai bahan evaluasi tahun berikutnya. Masyarakat tidakhanya memiliki hak untuk mengetahui pengelolaan keuangan tetapi berhak untuk menuntut pertanggungjawaban atas pengaplikasian serta pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah tersebut.

5.3 Implikasi Terapan

1. Melalui penelitian ini penulis menyarankan bagi BPKPD Kabupaten Malaka agar memperhatikan penyajian laporan keuangan daerah, aksesibilitas laporan keuangan daerah dan transparansi di BPKPD Kabupaten Malaka.
2. untuk peneliti selanjutnya diharapkan dapat menggali variabel-variabel lain yang juga berpengaruh dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah seperti pengendalian internal dan tingkat pengungkapan laporan keuangan.